

DAFTAR PUSTAKA

- Aiken, Michael dan Hage, Jerald. 1968. Organizational Interdependence and Intra-Organizational Structure. *American Sociological Review*. (Online), Vol. 33, No. 6, (<http://www.jstor.org/discover/10.2307>, diakses 4 Mei 2013).
- Almilia, L. Spica dan Retrinasari, Ikka. 2007. *Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Kelengkapan Pengungkapan dalam Laporan Tahunan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEJ*. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Inovasi dalam Menghadapi Perubahan Lingkungan Bisnis, Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, Jakarta, 9 Juni 2009.
- Atmaja, Kurniawan T. 2010. *Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pelaporan terhadap Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi DI Yogyakarta)*. Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2011*. Jakarta: BPK-RI
- _____. 2011. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2011*. Jakarta: BPK-RI.
- _____. 2012. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2012*. Jakarta: BPK-RI.
- _____. 2012. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2012*. Jakarta: BPK-RI.
- Bastian, Indra. 2009. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Cooke, Terry E. 1992. The Impact of Size, Stock Market Listing, and Industry Type on Disclosure in the Annual Reports of Japanese Listed. *Accounting and Business Research*. (Online), Vol. 22, No 87, (<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080>, diakses 4 Mei 2013).
- Fahmi, Irham. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Greiling, Dorothea. 2005. Performance Measurement in the Public Sector: the German Experience. *International Journal of Productivity and Performance Management*, (Online), Vol. 54 Iss: 7, (<http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1523669&show=abstract>, diakses 21 April 2013).

- Halim, Abdul. 2007. *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- _____. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, Sofyan S. 2011. *Teori Akuntansi Edisi Revisi 2011*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jensen, Michael C. dan Meckling, William H. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, agency Cost and Ownership Stucture. *Journal of Financial Economics*, Vol. 3 (4): 305-360.
- Julitawati, Ebit, Darwanis, dan Jalaluddin. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 1, No.1: 1-15.
- Kieso, E. Donald, Weygandt, Jerry, and Warfield, Terry. 2011. *Intermediate Accounting Volume 1 IFRS Edition*. Unites States of America: John Wiley and Sons, Inc.
- Kurniati, Siti. 2012. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota se-Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Krisis Ekonomi 2008*. Skripsi tidak diterbitkan. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mirza, Rifka Amalia. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2005 sampai tahun 2010*. Skripsi tidak diterbitkan. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Mustikarini, Widya Astuti dan Fitriasari, Debby. 2012. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Keinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun Anggaran 2007*. Makalah disajikan dalam Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin, 20-23 September 2012.
- Nam, Chan Woon dan Parsche, Rudiger. 2002. *Looking for Appropriate forms of Intergovernmental Transfers for Municipalities in Transition Economies*. Makalah disajikan dalam 42nd Congress of the European Regional Science Association (ERSA), Dortmund, 27-31 Agustus 2002.

- Nasution, Nina Andriany. 2011. *Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara*. Tesis tidak diterbitkan. Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Nugroho, Bhuono Agung. 2005. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi.
- Nugroho, Fajar dan Rohman, Abdul. 2012. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan daerah dengan Pendapatan Asli daerah sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Propinsi Jawa Tengah). *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 1 (2): 1-14.
- Nur, Turiman F. 2011. *Tiga Belas Masalah Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah*, (Online), (<http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2011/05/tiga-belas-masalah-keuangan-negara-dan.html>), diakses 22 April 2013).
- Oyelere, Peter, Laswad, Fawzi, dan Fisher, Richard. 2003. Determinants of Internet financial reporting by New Zealand Companies. *Journal of International Financial Management and Accounting*. Vol. 14 (1), 26-51.
- Patrick, Patricia A. 2007. *The Determinants of Organizational Innovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government*. Disertasi tidak diterbitkan. Pennsylvania: The Pennsylvania State University.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. 2010. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*. 2000. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Ramsamy, Bala, Ong, Darryl, dan Yeung, Matthew C.H. 2005. Firm Size, Ownership, and Performance in The Malaysian Palm Oil Industry. *Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance*. Vol.1: 81-104.
- Sadjiarto, Arja. 2000. Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 2 (2): 138-150.
- Said, Darwis, Mardiana, Ria, Rahmatia, Amar, M. Yunus, Habbe, Abdul H., Damayanti, Ratna A., Pontoh, Grace, Djaya, Yansor, Thayf, Hendragunawan S., dan Fattah, Sanusi. 2012. *Pedoman Penulisan Skripsi Edisi 1*. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

- Santosa, Purbayu B. dan Rahayu, Retno P. 2005. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri. *Dinamika Pembangunan*. Vol. 2 (1): 9-18.
- Sekaran, Uma dan Bougie, Roger. 2009. *Research Methods for Business 5th Edition*. United Kingdom: John Wiley and Sons Ltd.
- Sesotyaningtyas, Mirna. 2012. Pengaruh Leverage, Ukuran Legislatif, Intergovernmental Revenue, dan Pendapatan Pajak Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, (Online), Vol. 1, No. 1, (<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaaj/article/view/711>, diakses 21 April 2013).
- Sudarmadji, A. Murdoko, dan Sularto, Lana. 2007. *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Tipe kepemilikan Perusahaan Terhadap Luas Voluntary Disclosure Laporan Keuangan Tahunan*. Makalah ini disajikan dalam Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitek & Sipil), Jakarta, Auditorium Kampus Gunadarma, 21-22 Agustus 2007.
- Sularso, Havid dan Restianto, Yanuar E. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi*. Vol. 1 (2): 109-124.
- Sumarjo, Hendro. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi tidak diterbitkan. Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Suryani, Alfiah. 2010. *Pengaruh Rasio Leverage, Rasio Likuiditas, dan Firm Size terhadap Kinerja Perusahaan yang Masuk dalam Kelompok Jakarta Islamic Index periode 2004-2008*. Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. 2003. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. 2004. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. 2004. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 2000. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Wijaya, Tony. 2012. *SPSS 20; untuk Olah dan Interpretasi Data*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Wilson, Earl R., Reck, Jacquelin L., dan Kattelus, Susan C. 2010. *Accounting for Governmental and Nonprofit Entities 15th Edition*. New York: McGraw-Hill/Irwin.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sumarjo (2010)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Terikat: Kinerja Keuangan Pemerintah daerah Variabel Bebas: Ukuran Pemerintah daerah, Kemakmuran Pemerintah daerah, Ukuran Legislatif, Leverage, dan <i>Intergovernmental Revenue</i>	Ukuran pemerintah daerah, leverage, dan <i>intergovernmental revenue</i> berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan ukuran legislatif dan kemakmuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan
2.	Nasution (2010)	Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara	Variabel Terikat: Kinerja Keuangan Pemerintah daerah Variabel Bebas: Desentralisasi Fiskal dan PAD	Hanya variabel PAD yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Lanjutan Lampiran 1

3.	Julitawati, Darwanis, dan Jalaluddin (2012)	Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Aceh	Variabel Terikat: Kinerja Keuangan Pemerintah daerah Variabel Bebas: PAD dan dana Perimbangan	PAD dan Dana Perimbangan secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
4.	Mustikarini dan Fitriasari (2012)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun anggaran 2007	Variabel Terikat: Skor Kinerja Pemerintah daerah Variabel Bebas: Ukuran Pemerintah daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat, Belanja Daerah, dan Temuan Audit BPK	Variabel ukuran daerah, kekayaan daerah dan tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap skor kinerja Pemerintah daerah, sedangkan variabel belanja daerah dan temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap skor kinerja Pemerintah daerah.

Lanjutan Lampiran 1

5.	Sesotyangingtyas (2012)	Pengaruh Leverage, Ukuran Legislatif, Intergovernmental Revenue, dan Pendapatan Pajak Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Terikat: Kinerja Keuangan Pemerintah daerah Variabel Bebas: Leverage, Ukuran Legislatif, <i>Intergovernmental Revenue</i> , dan Pendapatan Pajak Daerah	Ukuran legislatif dan pendapatan pajak daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan <i>intergovernmental revenue</i> dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan
6.	Suryani (2010)	Pengaruh Rasio Leverage, Rasio Likuiditas, dan Firm Size terhadap Kinerja Perusahaan yang masuk dalam Kelompok Jakarta Islamic Index periode 2004-2008	Variabel Terikat: Kinerja Perusahaan (<i>Operating Profit</i> dan <i>Earning after Tax</i>) Variabel Bebas: Rasio <i>Leverage</i> , Rasio Likuiditas dan <i>Firm Size</i>	Rasio leverage dan firm size berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan (<i>operating profit</i>). Firm size berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan (<i>earning after tax</i>).

Sumber: Berbagai Penelitian Terdahulu

Lampiran 2: Informasi IKKPD, PAD, *Intergovernmenta Revenue*, Ukuran Pemerintah Daerah, dan *Leverage*

No	Kabupaten/Kota	Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah		
		2009	2010	2011
1	Kab. Bantaeng	0,63	0,56	0,63
2	Kab. Barru	0,64	0,59	0,69
3	Kab. Bone	0,54	0,50	0,51
4	Kab. Bulukumba	0,55	0,45	0,46
5	Kab. Enrekang	0,71	0,50	0,54
6	Kab. Gowa	0,83	0,79	0,72
7	Kab. Jeneponto	0,55	0,61	0,57
8	Kab. Luwu	0,55	0,57	0,63
9	Kab. Luwu Utara	0,69	0,67	0,67
10	Kab. Maros	0,63	0,53	0,63
11	Kab. Pangkep	0,67	0,61	0,59
12	Kab. Pinrang	0,64	0,51	0,55
13	Kab. Selayar	0,58	0,53	0,67
14	Kab. Sidrap	0,61	0,48	0,57
15	Kab. Sinjai	0,58	0,60	0,67
16	Kab. Soppeng	0,67	0,61	0,70
17	Kab. Takalar	0,59	0,42	0,45
18	Kab. Tana Toraja	0,69	0,57	0,57
19	Kab. Wajo	0,62	0,56	0,57
20	Kota Pare-Pare	0,77	0,75	0,69
21	Kota Makassar	0,72	0,70	0,75
22	Kota Palopo	0,65	0,63	0,69
23	Kab. Luwu Timur	0,93	0,77	0,68
24	Kab. Toraja Utara	0,65	0,62	0,70

Sumber: Data diolah

No	Kabupaten/Kota	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (dalam Rupiah)		
		2009	2010	2011
1	Kab. Bantaeng	12.178.360.935,97	11.084.858.781,34	19.468.167.086,54
2	Kab. Barru	12.604.247.923,13	12.918.018.238,91	16.832.795.188,50
3	Kab. Bone	39.201.846.144,42	34.842.143.749,72	34.414.657.470,28
4	Kab. Bulukumba	21.418.839.483,39	16.991.083.887,02	22.238.527.223,46
5	Kab. Enrekang	23.787.965.220,31	14.650.195.063,45	13.465.906.862,91
6	Kab. Gowa	49.522.385.717,53	55.440.280.535,89	83.221.491.179,90
7	Kab. Jeneponto	9.960.862.396,67	13.166.084.023,85	12.109.087.629,00

Lanjutan Lampiran 2

8	Kab. Luwu	19.337.923.976,93	17.954.313.156,81	18.318.366.436,00
9	Kab. Luwu Utara	20.966.296.139,86	59.143.942.602,28	34.613.374.804,90
10	Kab. Maros	27.437.789.369,87	26.453.736.544,23	46.998.588.484,62
11	Kab. Pangkep	59.176.335.521,74	52.038.626.802,82	60.930.305.487,71
12	Kab. Pinrang	26.722.938.346,22	21.008.952.488,40	26.639.115.860,44
13	Kab. Selayar	13.380.995.661,30	10.758.865.751,97	15.402.612.424,03
14	Kab. Sidrap	24.563.498.900,08	26.398.315.248,62	36.780.402.636,49
15	Kab. Sinjai	12.247.866.180,01	15.180.522.006,26	17.509.803.128,96
16	Kab. Soppeng	16.104.247.623,05	16.531.437.645,61	21.551.766.287,81
17	Kab. Takalar	13.982.155.696,68	12.394.100.941,48	14.829.509.380,04
18	Kab. Tana Toraja	20.787.650.359,03	20.238.615.778,05	19.645.163.452,76
19	Kab. Wajo	29.056.090.903,40	26.436.791.043,35	34.314.890.834,33
20	Kota Pare-Pare	37.378.318.089,91	45.252.486.012,78	50.922.101.827,46
21	Kota Makassar	170.698.725.818,79	210.136.331.090,64	351.692.552.587,60
22	Kota Palopo	21.550.761.903,30	28.219.019.905,66	35.703.421.516,00
23	Kab. Luwu Timur	64.807.549.036,06	59.143.942.602,28	64.107.149.333,16
24	Kab. Toraja Utara	5.809.001.980,80	8.282.309.919,69	14.591.747.810,85

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provnisi Sulawesi Selatan tahun 2009-2011

No	Kabupaten/Kota	<i>Intergovernmental Revenue (IR)</i>		
		2009	2010	2011
1	Kab. Bantaeng	0,81	0,80	0,75
2	Kab. Barru	0,79	0,72	0,69
3	Kab. Bone	0,87	0,78	0,71
4	Kab. Bulukumba	0,89	0,77	0,72
5	Kab. Enrekang	0,80	0,73	0,70
6	Kab. Gowa	0,81	0,78	0,66
7	Kab. Jeneponto	0,82	0,76	0,73
8	Kab. Luwu	0,90	0,81	0,71
9	Kab. Luwu Utara	0,89	0,80	0,73
10	Kab. Maros	0,84	0,87	0,68
11	Kab. Pangkep	0,75	0,76	0,66
12	Kab. Pinrang	0,87	0,75	0,70
13	Kab. Selayar	0,80	0,82	0,79
14	Kab. Sidrap	0,86	0,71	0,69
15	Kab. Sinjai	0,84	0,76	0,73
16	Kab. Soppeng	0,86	0,79	0,75
17	Kab. Takalar	0,89	0,77	0,69
18	Kab. Tana Toraja	0,84	0,80	0,69

Lanjutan Lampiran 2

19	Kab. Wajo	0,88	0,74	0,70
20	Kota Pare-Pare	0,84	0,75	0,67
21	Kota Makassar	0,69	0,59	0,52
22	Kota Palopo	0,79	0,78	0,69
23	Kab. Luwu Timur	0,73	0,65	0,65
24	Kab. Toraja Utara	0,88	0,79	0,76

Sumber: Data diolah

No	Kabupaten/Kota	Ukuran Pemerintah Daerah (Total Aset) dalam Rupiah		
		2009	2010	2011
1	Kab. Bantaeng	1.002.896.357.944,37	1.087.811.475.206	1.224.117.598.170,07
2	Kab. Barru	1.418.715.595.278,64	1.561.146.958.618	1.760.967.052.389,09
3	Kab. Bone	1.825.207.256.997,18	1.952.129.756.378	2.110.558.579.568,33
4	Kab. Bulukumba	1.795.323.561.595,69	1.832.756.567.979	1.965.338.378.223,47
5	Kab. Enrekang	1.153.873.925.572,95	1.273.890.271.945	1.194.586.005.178,86
6	Kab. Gowa	2.178.964.175.122,04	2.343.007.692.903	2.522.341.733.839,30
7	Kab. Jeneponto	1.070.017.320.574,26	1.129.598.214.669	1.318.511.129.835,48
8	Kab. Luwu	1.020.852.999.484,22	1.117.724.118.491	1.287.388.087.676,53
9	Kab. Luwu Utara	1.171.371.877.677,42	1.246.151.527.711	1.361.975.627.686,51
10	Kab. Maros	1.462.935.256.729,00	1.601.880.019.163	1.291.944.883.383,38
11	Kab. Pangkep	1.111.381.376.265,72	1.233.506.651.670	1.483.297.063.765,99
12	Kab. Pinrang	1.676.137.563.804,99	1.818.411.278.583	2.359.487.892.298,02
13	Kab. Selayar	1.384.651.200.544,92	1.459.737.957.166	1.393.065.351.996,69
14	Kab. Sidrap	1.774.623.638.792,26	1.944.179.768.217	2.122.440.313.353,32
15	Kab. Sinjai	1.628.294.403.458,08	1.763.915.288.536	1.905.815.982.403,96
16	Kab. Soppeng	1.063.364.384.279,66	1.181.164.195.832	1.324.531.045.899,36
17	Kab. Takalar	878.541.604.723,36	1.274.390.170.168	1.351.590.696.269,35
18	Kab. Tana Toraja	1.005.588.601.849,66	1.078.334.692.170	1.007.679.207.056,94
19	Kab. Wajo	1.808.663.277.460,13	1.955.202.763.289	2.167.697.733.016,72
20	Kota Pare-Pare	1.396.808.140.826,50	1.494.739.439.079	1.645.672.174.509,81
21	Kota Makassar	7.384.003.476.092,79	8.634.479.108.039	8.831.488.948.246,92
22	Kota Palopo	548.670.239.052,06	673.501.501.706	979.127.899.789,22
23	Kab. Luwu Timur	1.455.040.636.955,81	1.564.380.464.059	1.781.352.225.450,97
24	Kab. Toraja Utara	25.819.930.936,80	148.225.581.723	543.546.219.448,93

Sumber: Neraca Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009-2011

No	Kabupaten/Kota	<i>Leverage</i>		
		2009	2010	2011
1	Kab. Bantaeng	0,0016	0,0042	0,0101
2	Kab. Barru	0,0334	0,0241	0,0441
3	Kab. Bone	0,0532	0,0339	0,0293
4	Kab. Bulukumba	0,0017	0,0075	0,0108
5	Kab. Enrekang	0,0203	0,0279	0,0374
6	Kab. Gowa	0,0044	0,0066	0,0021
7	Kab. Jeneponto	0,0695	0,0602	0,0663
8	Kab. Luwu	0,0016	0,0023	0,0011
9	Kab. Luwu Utara	0,0002	0,0000	0,0002
10	Kab. Maros	0,0645	0,0729	0,0643
11	Kab. Pangkep	0,0214	0,0264	0,0264
12	Kab. Pinrang	0,0198	0,0184	0,0063
13	Kab. Selayar	0,0102	0,0144	0,0034
14	Kab. Sidrap	0,0564	0,0659	0,0721
15	Kab. Sinjai	0,0133	0,0203	0,0049
16	Kab. Soppeng	0,0065	0,0052	0,0063
17	Kab. Takalar	0,0114	0,0055	0,0253
18	Kab. Tana Toraja	0,0399	0,0142	0,0109
19	Kab. Wajo	0,0026	0,0035	0,0159
20	Kota Pare-Pare	0,0251	0,0283	0,0695
21	Kota Makassar	0,0183	0,0138	0,0137
22	Kota Palopo	0,0330	0,0590	0,0506
23	Kab. Luwu Timur	0,0339	0,0048	0,0110
24	Kab. Toraja Utara	0,0096	0,0005	0,0007

Sumber: Data diolah

Lampiran 3: Hasil Pengolahan Data

Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
IKKPD	72	,42	,93	,6211	,09306
PAD	72	22,48	26,59	23,9672	,73341
IR	72	,52	,90	,7638	,07600
Ukuran_Pemda	72	23,97	29,81	27,9581	,72271
Leverage	72	,00	7,29	2,2976	2,21253
Valid N (listwise)	72				

Sumber: Output SPSS

Hasil Uji Multikolinearitas, Hasil Regresi, dan Uji *t*

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-,471	,494		-,954	,343		
1 PAD	,102	,018	,806	5,839	,000	,501	1,996
IR	,145	,144	,118	1,005	,319	,690	1,450
Ukuran_Pemda	-,052	,017	-,405	-3,126	,003	,569	1,756
Leverage	-,005	,004	-,125	-1,272	,208	,994	1,006

a. Dependent Variable: IKKPD

Sumber: Output SPSS

Hasil Uji Autokorelasi dan Koefisien Determinasi

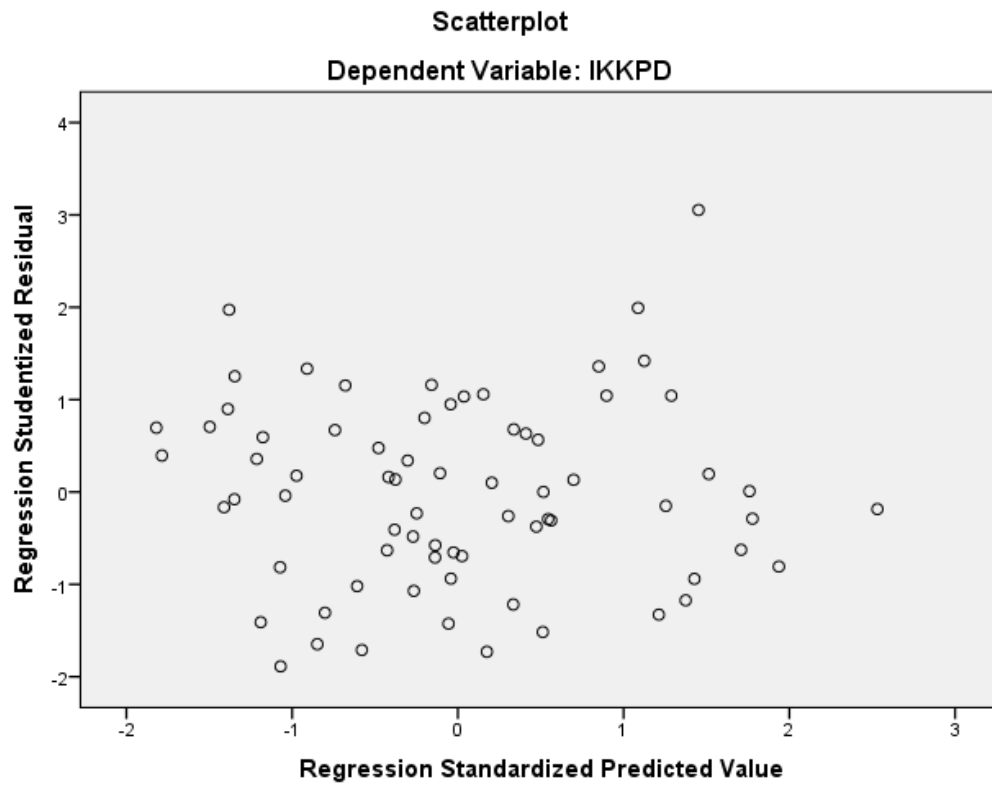
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,600 ^a	,360	,322	,07665	1,855

a. Predictors: (Constant), Leverage, PAD, IR, Ukuran_Pemda

b. Dependent Variable: IKKPD

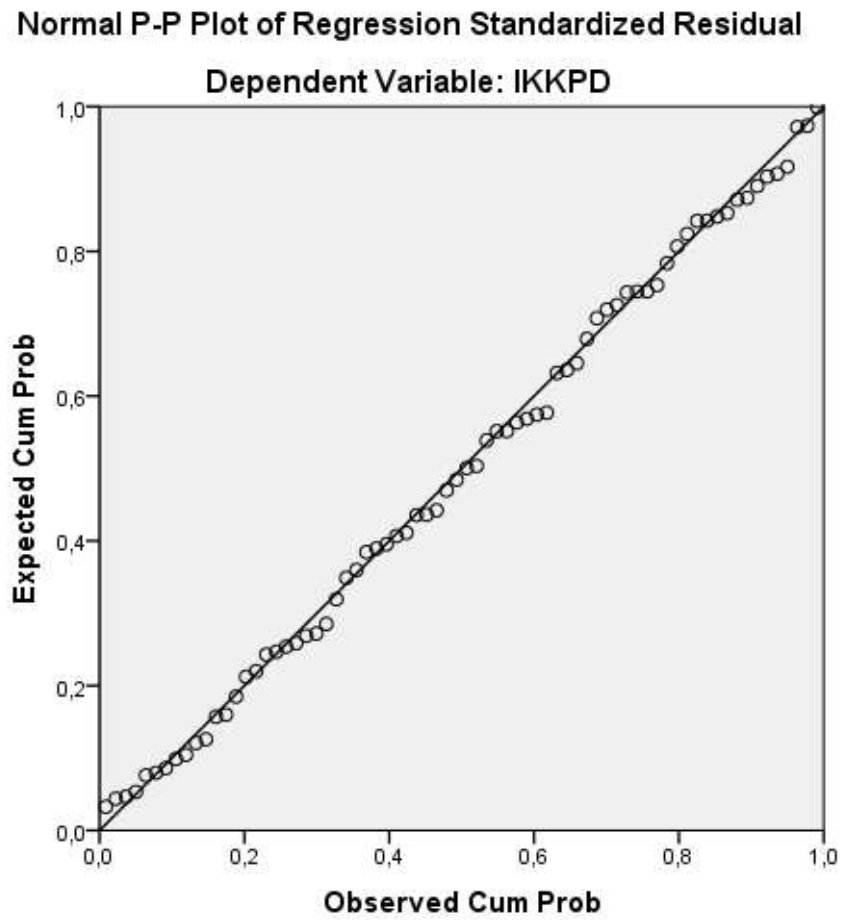
Sumber: Output SPSS

Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Output SPSS

Uji Normalitas



Sumber: Output SPSS